

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada. Depok.
- Adriana Elisabet (dkk.). 2005. *Agenda & Potensi Damai Di Papua*, Lembaga ilmu pengetahuan Indonesia Press. Jakarta.
- Achmad Ruslan, 2021, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Rangkang Education, Tangerang
- Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana, Jakarta
- Abraham Amos, 2005, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Dari Orla, Orba Sampai Reformasi) Telaah Sosiologi Yuridis Dan Yuridis Pragmatis Krisis Jati Diri Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Alboin Pasaribu (.dkk), 2011, *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Penafsiran Mahkamah Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Busrizalti. 2013. *Hukum Pemda Otonomi Daerah Dan Implikasinya*. Total Media. Yogyakarta.
- Bagir Manan, 2012, *Membedah UUD 1945*, UB Pres, Malang,
- Eka Nam Sihombing, 2018, *Hukum Kelembagaan Negara*, CV Pustaka Prima, Medan.
- Eddy Suratman (dkk.), 2012, *Desain Penataan Daerah Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2025*, Kemitraan Bagi pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta Selatan.
- Fajlurrahman Jurdi, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Fajlurrahman Jurdi, 2016, *Teori Negara Hukum*, Setara Press. Malang
- Faried Ali dan Nurlina Muhidin, 2017, *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom Dan Otonom*, Refika Aditama, Bandung.
- Husni Jalil (.dkk), 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Prespektif Otonomi Khusus*, CV. Social Politic Genius (SIGN). Makassar.

- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Mirra Buana Media. Depok.
- Irfan Setiawan, 2018, *Handbook pemerintahan daerah*. Wahana Resolusi. Yogyakarta.
- Inonsentius Samsul, 2021, *Prosiding Rancangan Undang-Undang Pemekaran Provinsi Papua*, Badan Keahlian DPR RI dan Universitas Cendrawasih, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqe, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqe, 2006, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Janu Ismadi, 2019, *Demokrasi Tiang Negara*, Delta Edukasi Prima, Banten.
- Kementrian Hukum dan HAM-Badan Pembinaan Hukum Nasional, *"Pengkajian Hukum Tentang Pemekaran Dan Penggabungan Daerah"*. Jakarta.
- Laila Kholid Alfirmidus dan Longgina Novadano Bayo, 2007, *Penataan Daerah Sebagai Penataan Institusi*, Yayasan percik Salatiga & Ford Foundation, Salatiga.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press. Mataram.
- Murtir Jeddawi. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Beberapa Perda Tentang Penanaman Modal*. UII Press. Yogyakarta.
- M. Hutauruk, 1978, *Asas-Asas Ilmu Negara Cetakan-2*, Erlangga, Jakarta.
- Miftah Thoha, 2014, *Birokrasi Dan Dinamika Kekuasaan*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2021, *Desentralisasi Secara Umum Dan Desentralisasi Asimetris di Indonesia*, Nusamedia. Bandung.
- Nurul Qamar dan Farah Syah Reza, 2015, *Ilmu Kenegaraan (Staatswissenschaft)*, Mitra Wacana Media. Bogor.
- Padmo Wahjono, 1982, *Negara Republik Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta.

- Rozali Abdullah, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT Raja Grafindo. Depok.
- Robert Na Endi Jaweng, 2022, *Empat Wajah Desentralisasi Membaca Dekade Kedua Otonomi Daerah Di Indonesia*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Sadu Wasistiono (dkk.), 2012, *Parameter Daerah Persiapan Penjelasan Teknis Pembentukan Daerah Otonomi Baru Dalam Desain Penataan Daerah*, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta Selatan.
- Syaukani, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid, 2005, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sri Kursiyah, 2019, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Unissula Press, Semarang.
- Sugianto, 2018, *Ilmu Negara : Sebuah Kajian Dalam Prespektif Teori Kenegaraan Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2017, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Prenamedia Group, Depok,
- UU Nurul Huda, 2020, *Hukum Lembaga Negara*, PT Refika Aditama, Bandung
- Zaenal Abidin Kertawijaya, 2022, *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, Mutiara Aksara, Semarang,

Jurnal :

- Arianti Singal, “Penataan Daerah Dalam Mewujudkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Berkaitan Dengan Pasal 31 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014”, *Jurnal Lex Administratum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol.III, Nomor 8 Oktober 2015.
- Azies Bauw, “Prosedur Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemekaran Daerah”, *Jurnal Legal Pluralism*, Vol,8, Nomor 1 Januari 2018.
- Bagio Kardayanto, “Implikasi Pembentukan Daerah Persiapan Otonomi Baru Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Aktualita*,

Pascasarjana Univeritas Islam Bandung, Vol. 1, Nomor 2 Desember 2018.

Djorhermansyah Djohan, "Desertada : Kebijakan Penataan Daerah", Jurnal Kementerian Sekretariat Negara RI, Nomor 21 Tahun 2011.

Gunawan A. Tauda. "Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia". *Administrative Law & Governance Journal*._ Fakultas Hukum Universitas Khairun. Vol. 1. Nomor 4 November 2018.

Irfan Maksun, "Memahami Desentralisasi Fungsional (Perbandingan Praktek di Belanda, Jepang, USA, Dan Jerman)", *Indonesian Journal of International Law*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol: 4, Nomor 3 April 2007.

Iskatrinah, "Politik Hukum Pemekaran Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia", Jurnal De Lega Lata, Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Vol.2, Nomor 1 Januari 2017.

Lukman Santoso, "Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia", Jurnal Supremasi Hukum, STAIDA Lampung, Vol. 1, No 2 Desember 2012.

Lukman Santoso, "Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia", Jurnal Supremasi Hukum, STAIDA Lampung, Vol. 1, No 2 Desember 2012.

M. Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (*Tiga Nilai Dasar Hukum*)", Jurnal Legalitas, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Vol:4, Nomor 1 Juni 2013.

Mel Embassy, M., & ACHMADY, L. 2020 . *Pendekatan Pemekaran Wilayah, Prinsip Dan Filosofinya Untuk Tanah Papua*. Jurnal Dinamis, Vol 17. No. 1 Juli 2020.

Nunik Retno Herawati. "Pemekaran Daerah Di Indonesia". Jurnal Politika, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Vol 2. Nomor 1 April 2011.

Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. 2017. Undang-undang otonomi daerah dan pembangunan ekonomi daerah. Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan). Universitas Negeri Semarang. Volume 2 No.2 April 2017.

- Rahmat Suaib. "Urgensi Pemekaran Daerah Di Indonesia". Jurnal Government Of Archipelago. Fakultas Ilmu sosial dan politik Unversitas Muhammadiyah Maluku Utara. Vol 1. Nomor 1. Maret 2020.
- Reynold Simandjuntak,"Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional", De Jure Jurnal Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Manado, Vol,7, Nomor 1 Juni 2015.
- Sait Abdullah, "Desentralisasi : Konsep, Teori Dan Perdebatannya",Jurnal Desentralisasi, Vol 6,Nomor 4 Tahun 2005.
- Sri Nur Hari Susanto. " Desentralisasi Dalm Konteks Negara Kesatuan". Administrative Law & Governance Journal. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Vol 2. Nomor 4 November 2019
- Salman Luthan, "Hubungan Hukum dan Kekuasaan", Jurnal Hukum, Vol,14, April 2007.
- Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka, "Kohesi Gramatikal Dalam Ragam Bahasa Perundang-Undangan", Jurnal Kandai, Badan Pengembang dan Pembinaan Bahasa, Vol.12 Nomor 1 Mei 2016.
- Yusdianto, "Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Padjadjaran, Vol,2, Nomor 3 Tahun 2015.

Surat Kabar :

<https://koreri.com/2022/06/25/timika-dan-nabire-saling-rebut-ibukota-provinsi-papua-tengah/> (Koran Online)

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17609&menu=2> (Koran Online)

<https://www.republika.co.id/berita/r8si6u430/pakar-pemekaran-papua-tetap-butuh-daerah-persiapan> (Koran Online)

<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/07/06300061/korupsi-berulang-kepala-daerah> (Koran Online)

<https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/03/10/moratorium-pemekaran-wilayah-dan-konsistensi-otonomi-papua>(Koran Online)

Ceramah :

Akbar Silo , Ceramah : “Pemekaran Provinsi Papua : Tantangan dan Peluang”, Universitas Cendrawasih, 22 September 2021.

Valentinus Sudarjanto Sumito, “Papua Strategic Policy Forum #12 Pemekaran Papua Sebagai Resolusi Konflik ?”, Youtube Gugus Tugas Papua.

Wawancara :

Made Supriatma, Peneliti ISEAS-Yusof Ishak Institute, Wawancara, Narasi Newsroom, 15 September 2021.

Naskah Akademik :

Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang otonomi khusus Papua.

Skripsi :

Muksin Syahputra Siregar. *“Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah Indonesia Perspektif Siyazah”*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri. Padangsidimpuan.

Muhammad Habib, 2008, “Konsep Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia” Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Syahrani Nasria, 2018, “Implikasi Sosial Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karave Kabupaten Mamuju Utara”, Skripsi Sarjana Pendidikan Sosiologi, Univeritas Muhammadiyah Makassar.

Makalah/Majalah :

Antonius Taringan, “Dampak Pemekaran Wilayah”, Majalah Perencanaan Pembangunan, EDISI 01/TAHUN XVI/2010,

Idil Akbar, Makalah : “Otonomi, Pemekaran Daerah, dan Masalah Integrasi”, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjajaran.

Jimly Asshiddiqie, Makalah “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, Disampaikan pada forum dialog perencanaan dan pembangunan hukum nasional oleh badan pembinaan hukum nasional, Kemenkumham, November 2011.

Silva Syahraini, Makalah: "Teori-Teori Dalam Pemerintahan Daerah",
Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Sidrap, 6 Oktober
2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Papua

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang
Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah